

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden No 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Adapun fungsi yang diselenggarakan meliputi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemen PPPA; dan
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemen PPPA.

Sebagai realisasi tugas dan fungsi tersebut, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang mampu menterjemahkan tugas dan fungsi dimaksud. RKT Tahun 2014 Kemen PPPA memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan Kemen PPPA Tahun 2014.

Dengan disusunnya RKT RKT Tahun 2014 Kemen PPPA diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Tahun 2014 Kemen PPPA.

Sekretaris Kementerian

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tujuan | 2 |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN | 3 |
| A. Visi | 3 |
| B. Misi | 3 |
| C. Tujuan | 3 |
| D. Sasaran | 3 |
| BAB III KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN | 4 |
| A. Kebijakan | 4 |
| B. Strategi | 4 |
| C. Program dan Kegiatan | 5 |
| LAMPIRAN | 9 |
| 1. Formulir RKT Kementerian PP dan PA | |
| 2. Formulir RKT Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi | |
| 3. Formulir RKT Deputi Bidang PUG Bidang Politik, Sosial dan Hukum | |
| 4. Formulir RKT Deputi Bidang Perlindungan Perempuan | |
| 5. Formulir RKT Deputi Bidang Perlindungan Anak | |
| 6. Formulir RKT Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak | |
| 7. Formulir RKT Sekretariat Kementerian | |
| 8. Formulir RKT Inspektorat | |
| 9. Formulir RKT KPAI | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban Renstra kepada masyarakat dapat dilihat dari dua jalur utama, yaitu jalur pertanggungjawaban keuangan dan jalur pertanggungjawaban kinerja. Rambu-rambu jalur pertanggungjawaban keuangan dan jalur pertanggungjawaban kinerja harus tertata dengan baik.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu issue yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra, sehingga RKT dapat menggambarkan rencana penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan RKT adalah target setting dari capaian indicator kinerja.

Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai fungsi koordinasi dalam pelaksanaan administrasi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu menyusun RKT Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014 dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010-2014.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan RKT Tahun 2014 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah memberi acuan bagi pelaksana kegiatan di lingkup Kemen PPPA dalam melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas pokoknya terkait fungsi koordinasi, manajemen dan administrasi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi

" Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Terpenuhinya Hak Anak".

B. Misi

Untuk mewujudkan Visi Organisasi, maka Misi yang diemban Kementerian PP dan PA adalah: " Meningkatkan Kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak."

C. Tujuan

Sesuai dengan Visi dan Misi, maka tujuan organisasi yang akan dijalankan oleh Kementerian PP dan PA selama periode tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan yang responsif gender;
2. Mewujudkan pembangunan yang peduli anak; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

D. Sasaran

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang ekonomi.
2. Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang polsoskum.
3. Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan hak perempuan.
4. Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan hak anak.
5. Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan tumbuh kembang anak.

BAB III

KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Kebijakan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2014 maka arah kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak difokuskan pada:

1. Menyusun berbagai kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan hak anak termasuk kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak;
2. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, anggaran dan kegiatan yang responsif gender dan peduli anak pada program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
3. Membangun jejaring kelembagaan dan nara sumber pada tingkat daerah, nasional dan internasional untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG dan mendorong pemenuhan hak anak;
4. Melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan yang responsif gender dan peduli anak di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
5. Menyusun manajemen yang akuntabel dan terintegrasi.

B. Strategi

1. Strategi Eksternal
 - a. Meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan yang responsif gender di berbagai bidang pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah;
 - b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan fasilitasi penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender dan peduli anak di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Meningkatkan kualitas pengelolaan data gender.
2. Strategi Internal
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional yang responsif gender;

- b. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja Kementerian PP dan PA dan kinerja pegawai;
- c. Meningkatkan kompetensi SDM Kementerian PP dan PA secara proposional dan akuntabel;
- d. Menerapkan prinsip-prinsip good governance di Kementerian PP dan PA; dan
- e. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Kementerian PP dan PA dan pegawai.

3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Strategi

- a. Kebijakan yang dirumuskan akan berpegang pada bukti dan fakta (evidence-based policy formulation);
- b. Penyusunan pedoman pelaksanaan PUG dan PUHA serta berbagai perangkat lainnya dilakukan bersama dengan Kementerian/Lembaga untuk membangun rasa kepemilikan dan kemandirian;
- c. Meningkatkan etos kerja dan mendayagunakan SDM berpotensi untuk mempercepat pelaksanaan dan kualitas pencapaian program dan kegiatan;
- d. Pelaksanaan setiap kegiatan dirumuskan untuk dapat memberi nilai tambah pada kemampuan SDM KPP dan PA; dan
- e. Pelaksanaan strategi bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan perubahan dan kemajuan yang terjadi di lingkungan strategis.

C. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai sasaran, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai 2 (dua) program teknis dan 1 (satu) program generik yaitu:

1. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (teknis)

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam proses perumusan kebijakan dan program yang responsi gender di bidang perekonomian, sosial, politik dan hukum serta perumusan kebijakan dan program perlindungan hak-hak perempuan.

2. Program perlindungan anak (teknis)

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam proses perumusan kebijakan dan program perlindungan dan pemenuhan hak tumbuh kembang anak.

3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (generik)

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam proses mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selanjutnya, program-program tersebut di jabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan:

- 1) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang responsif gender;
- 2) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan yang responsif gender;
- 3) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis yang responsif gender;
- 4) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang responsif gender;
- 5) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan di bidang infrastruktur yang responsif gender;
- 6) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan di bidang pendidikan yang responsif gender;
- 7) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan di bidang Kesehatan yang responsif gender;

- 8) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan di bidang sumberdaya alam dan lingkungan yang responsif gender;
 - 9) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan yang responsif gender;
 - 10) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan di bidang hukum yang responsif gender;
 - 11) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
 - 12) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan;
 - 13) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan;
 - 14) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang; dan
 - 15) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penyusunan data gender.
2. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Program Perlindungan Anak:
- 1) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak;
 - 2) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan masalah sosial anak;
 - 3) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - 4) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan bagi anak yang berkebutuhan khusus;
 - 5) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan hak sipil anak;
 - 6) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak;
 - 7) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak;
 - 8) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak;
 - 9) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur pada anak; dan
 - 10) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA).

3. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya:
 - 1) Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Program;
 - 2) Pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kementerian PP dan PA;
 - 3) Koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat;
 - 4) Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - 5) Telaahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

LAMPPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Kementerian : Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
 Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|--|------------------------------------|
| 1. Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang ekonomi | 1. Jumlah kebijakan yang responsive gender di bidang ekonomi | 1 Kebijakan |
| | 2. Jumlah Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menerapkan kebijakan yang responsive gender di bidang ekonomi | 21 K/L 16 Prov |
| | 3. Jumlah Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah daerah yang memanfaatkan data gender di bidang ekonomi | 17 K/L 14 Prov |
| 2. Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang polsoskum | 1. Jumlah kebijakan yang responsive gender di bidang polsoskum | 6 Kebijakan |
| | 2. Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menerapkan kebijakan yang responsive gender di bidang polsoskum | 11 K/L 26 Provinsi |
| | 3. Jumlah Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah daerah yang memanfaatkan data gender di bidang polsoskum | 10 K/L dan 18 Provinsi |
| 3. Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan hak perempuan | 1. Jumlah kebijakan perlindungan hak perempuan; | 1 kebijakan |
| | 2. Jumlah Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menerapkan kebijakan perlindungan hak perempuan; | 8 K/L 11 Provinsi 6 Kab/Kota |
| | 3. Persentase korban kekerasan yang memperoleh pelayanan; | 40% |
| | 4. Jumlah Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah daerah yang memanfaatkan data gender dan anak di bidang perlindungan hak perempuan | 11 K/L 12 Provinsi |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|--|-----------------------------------|
| 4. Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan hak anak | 1. Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menerapkan kebijakan perlindungan hak anak. | 9 K/L 20 Prov |
| | 2. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan. | 40% |
| | 3. Jumlah Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah daerah yang memanfaatkan data perlindungan anak. | 6 K/L 17 Prov |
| 5. Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan tumbuh kembang anak | 1. Jumlah Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menerapkan kebijakan tumbuh kembang anak; | 12 K/L 27 Prov 100 Kab/Kota |
| | 2. Jumlah Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah daerah yang memanfaatkan data tumbuh kembang anak; | 5 K/L 33 Prov 100 Kab/Kota |
| | 3. Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). | 100 Kab/Kota |

Jakarta, November 2013

Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Linda Amalia Sari, S.IP

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi

Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|--|-------------------|
| 1. Meningkatnya pemenuhan perempuan dan laki-laki dibidang ekonomi | 1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ekonomi di tingkat nasional dan daerah | 1 Kebijakan |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang mengembangkan kebijakan/program/ kegiatan yang responsif gender di bidang ekonomi | 12 K/L 11 Prov |
| 2. Meningkatnya jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data terpilah perempuan dan laki-laki di bidang ekonomi | 1. Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data terpilah perempuan dan laki-laki di bidang ekonomi | 5 K/L 6 Prov |

Jakarta, November 2013
Deputi
Bidang PUG Bidang Ekonomi

Dr. Ir. Sulikanti Agusni, M.Sc
NIP. 19550627.198103.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Gender dalam Ketenagakerjaan

Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|---|-----------------|
| 1. Meningkatnya pemenuhan perempuan dan laki-laki dibidang ketenagakerjaan | 1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan | 1 Kebij |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG bidang ketenagakerjaan | 2 K/L 3 Prov |
| | 3. Jumlah K/L dan Pemda yang mengembangkan kebijakan/program/ kegiatan bidang ketenagakerjaan | 2 K/L 3 Prov |
| 2. Meningkatnya jumlah pemanfaatan data terpilih perempuan dan laki-laki di bidang ketenagakerjaan | 1. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data bidang ketenagakerjaan | 2 K/L 2 Prov |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data bidang ketenagakerjaan | 1 K/L 2 Prov |

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Gender Dalam Gender Dalam Ketenagakerjaan

Drs. Ninin Nirawaty, MEDPA
NIP. 19540722.197903.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Gender dalam koperasi, usaha mikro dan kecil, industri dan perdagangan

Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|--|-----------------|
| 1. Meningkatnya pemenuhan perempuan dan laki-laki dibidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri dan perdagangan | 1. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan pelaksanaan PUG bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri dan perdagangan | 4 K/L 3 Prov |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang mengembangkan kebijakan/program/kegiatan yang responsive gender di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri dan perdagangan | 1 K/L 2 Prov |
| 2. Meningkatnya jumlah pemanfaatan data terpilah perempuan dan laki-laki di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri dan perdagangan | 1. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah perempuan dan laki-laki di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri dan perdagangan | 4 K/L 3 Prov |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data terpilah perempuan dan laki-laki di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri dan perdagangan | 1 K/L 1 Prov |

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Gender dalam Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil,
Industri dan Perdagangan

Dra. Sunarti, M.Sc
NIP. 19581008.198703.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Gender dalam Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan

Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|-----------------|
| 1. Meningkatnya pemenuhan perempuan dan laki-laki dibidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan dan agrobisnis | 1. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan dan agrobisnis | 3 K/L 3 Prov |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang mengembangkan kebijakan/program/ kegiatan bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan dan agrobisnis | 1 K/L 1 Prov |
| 2. Meningkatnya jumlah pemanfaatan data terpilah perempuan dan laki-laki di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan dan agrobisnis | 1. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah perempuan dan laki-laki di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan dan agrobisnis | 3 K/L 5 Prov |

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Gender dalam Pertanian, Kehutanan, Perikanan
dan Kelautan

Dra. Eko Novi Ariyanti, M.Si
NIP. 19671105.199312.2.002

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Gender dalam IPTEK dan Sumber Daya Ekonomi

Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|--|-----------------|
| 1. Meningkatnya pemenuhan perempuan dan laki-laki dibidang IPTEK dan sumberdaya ekonomi | 1. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG bidang IPTEK dan sumberdaya ekonomi | 6 K/L 2 Prov |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang mengembangkan kebijakan/program/ kegiatan bidang IPTEK dan sumberdaya ekonomi | 2 K/L 1 Prov |
| 2. Meningkatnya jumlah pemanfaatan data terpilah perempuan dan laki-laki di bidang IPTEK dan sumberdaya ekonomi | 1. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data bidang IPTEK dan sumberdaya ekonomi | 2 K/L 3 Prov |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data bidang IPTEK dan sumberdaya ekonomi | 1 K/L 1 Prov |

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Gender dalam IPTEK dan Sumber Daya Ekonomi

Drs. Bambang Kristiono, M. Si
NIP. 19560530.198303.1.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Gender dalam Infrastruktur

Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|--|-----------------|
| 1. Meningkatnya pemenuhan perempuan dan laki-laki dibidang Infrastruktur | 1. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan bidang Infrastruktur | 6 K/L 6 Prov |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang mengembangkan kebijakan/program/ kegiatan bidang Infrastruktur | 6 K/L 4 Prov |
| 2. Meningkatnya jumlah pemanfaatan data terpilah perempuan dan laki-laki di bidang Infrastruktur | 1. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah perempuan dan laki-laki di bidang Infrastruktur | 6 K/L 2 Prov |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data terpilah perempuan dan laki-laki di bidang Infrastruktur | 2 K/L 2 Prov |

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Gender dalam Infrastruktur

Dra.Valentina Ginting, MSi.
NIP. 196304291990032001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang PUG Bidang Politik, Sosial dan Hukum

Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|------------------------|
| 1. Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang Politik, Sosial dan Hukum | 1. Jumlah kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dibidang Politik, Sosial dan Hukum | 6 Kebijakan |
| 2. Meningkatnya jumlah kebijakan/program/kegiatan yang responsive gender di bidang Politik, Sosial dan Hukum yang dilaksanakan oleh kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah | 1. Jumlah K/L/pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan/ program/kegiatan yang responsif gender di bidang Politik, Sosial dan Hukum | 11 K/L dan 26 Provinsi |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang memiliki dan mengembangkan kebijakan/program/ kegiatan bdg Polsoskum yang responsif gender | 11 K/L dan 26 Provinsi |
| 3. Meningkatnya jumlah K/L dan Pemda yang memiliki dan atau memanfaatkan Kebijakan Sistem Data Gender dibidang Politik, Sosial dan Hukum. | 1. Jumlah Kebijakan sistem data gender di bidang Politik Sosial dan Hukum. | - |
| | 2. Jumlah K/L/pemda yang difasilitasi dalam penyusunan kebijakan data gender di bidang Politik, Sosial dan Hukum | 10 K/L dan 18 Provinsi |
| | 3. Jumlah K/L/pemda yang memiliki dan memanfaatkan data gender di bidang Politik, Sosial dan Hukum | 10 K/L dan 18 Provinsi |

Jakarta, November 2013

Sekretaris Kementerian,

Dra. Sri Danti Anwar, MA
NIP. 19591115.198803.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Gender Dalam Hukum

Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|---|-----------------|
| 1. Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang Hukum | 1. Jumlah kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dibidang Hukum | 3 Kebij |
| 2. Meningkatnya jumlah kebijakan/program/kegiatan yang responsive gender di bidang Hukum yang dilaksanakan oleh kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah. | 1. Jumlah K/L/pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan/ program/kegiatan yang responsif gender di bidang Hukum | 3 K/L 5 Prov |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang memiliki dan mengembangkan kebijakan/ program/kegiatan bidang Hukum yang responsif gender | 3 K/L 5 Prov |
| 3. Meningkatnya jumlah K/L dan Pemda yang memiliki dan atau memanfaatkan Kebijakan Sistem Data Gender dibidang Hukum. | 1. Jumlah Kebijakan sistem data gender di bidang Hukum. | - |
| | 2. Jumlah K/L/pemda yang difasilitasi dalam penyusunan kebijakan data gender di bidang Hukum | 4 K/L 2 Prov |
| | 3. Jumlah K/L/pemda yang memiliki dan memanfaatkan data gender di bidang Hukum | 4 K/L 2 Prov |

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Gender Dalam Hukum

Sri Prihatini Lestari Wijayanti,SH.MH
NIP. 196209071988032001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Gender Dalam Kesehatan

Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|--|-----------------|
| 1. Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang Kesehatan | 1. Jumlah kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dibidang Kesehatan | - |
| 2. Meningkatnya jumlah kebijakan/program/kegiatan yang responsive gender di bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah. | 1. Jumlah K/L/pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan/ program/kegiatan yang responsif gender di bidang Kesehatan | 1 K/L 5 Prov |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang memiliki dan mengembangkan kebijakan/ program/kegiatan Bidang Kesehatan Polsoskum yang responsif gender | 1 K/L 5 Prov |
| 3. Meningkatnya jumlah K/L dan Pemda yang memiliki dan atau memanfaatkan Kebijakan Sistem Data Gender dibidang Kesehatan | 1. Jumlah Kebijakan sistem data gender di bidang Kesehatan | - |
| | 2. Jumlah K/L/pemda yang difasilitasi dalam penyusunan kebijakan data gender di bidang Kesehatan | 1 K/L 6 Prov |
| | 3. Jumlah K/L/pemda yang memiliki dan memanfaatkan data gender di bidang Kesehatan | 1 K/L 6 Prov |

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Gender Dalam Kesehatan

Ir. Dewi Yuni Muliati
NIP. 19590629.198703.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Gender Dalam Pendidikan

Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|--|-----------------|
| 1. Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang Pendidikan | 1. Jumlah kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dibidang Pendidikan | 1 Kebij |
| 2. Meningkatnya jumlah kebijakan/program/kegiatan yang responsive gender di bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah. | 1. Jumlah K/L/pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan/ program/kegiatan yang responsif gender di bidang Pendidikan | 1 K/L 6 Prov |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang memiliki dan mengembangkan kebijakan/ program/kegiatan bidang Pendidikan yang responsif gender | 1 K/L 6 Prov |
| 3. Meningkatnya jumlah K/L dan Pemda yang memiliki dan atau memanfaatkan Kebijakan Sistem Data Gender dibidang Pendidikan | 1. Jumlah Kebijakan sistem data gender di bidang Pendidikan | - |
| | 2. Jumlah K/L/pemda yang difasilitasi dalam penyusunan kebijakan data gender di bidang Pendidikan | 1 K/L 3 Prov |
| | 3. Jumlah K/L/pemda yang memiliki dan memanfaatkan data gender di bidang Pendidikan | 1 K/L 3 Prov |

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Gender Dalam Pendidikan

Dra. Sally Astuty Wardhani, M.Si
NIP. 19540313.198003.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Gender Dalam Politik dan Pengambilan Keputusan
Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|---|-----------------|
| 1. Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang Politik dan Pengambilan Keputusan | 1. Jumlah kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dibidang Politik dan Pengambilan Keputusan | 1 kebij |
| 2. Meningkatnya jumlah kebijakan/program/kegiatan yang responsive gender di bidang Politik dan Pengambilan Keputusan yang dilaksanakan oleh kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah. | 1. Jumlah K/L/pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan/ program/kegiatan yang responsif gender di bidang Politik dan Pengambilan Keputusan | 2 K/L 6 Prov |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang memiliki dan mengembangkan kebijakan/ program/kegiatan bidang Politik dan Pengambilan Keputusan yang responsif gender | 2 K/L 6 Prov |
| 3. Meningkatnya jumlah K/L dan Pemda yang memiliki dan atau memanfaatkan Kebijakan Sistem Data Gender dibidang Politik dan Pengambilan Keputusan | 1. Jumlah Kebijakan sistem data gender di bidang Politik Sosial dan Hukum. | - |
| | 2. Jumlah K/L/pemda yang difasilitasi dalam penyusunan kebijakan data gender di bidang Politik dan Pengambilan Keputusan | 3 K/L 3 Prov |
| | 3. Jumlah K/L/pemda yang memiliki dan memanfaatkan data gender di bidang Politik dan Pengambilan Keputusan | 3 K/L 3 Prov |

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Gender Dalam Politik dan Pengambilan Keputusan

Drs. A Darsono. M.Si
NIP. 19590613.198003.1.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Gender Dalam Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|--|-----------------|
| 1. Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang SDA dan Lingkungan | 1. Jumlah kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dibidang SDA dan Lingkungan | 1 Kebij |
| 2. Meningkatnya jumlah kebijakan/program/kegiatan yang responsive gender di bidang SDA dan lingkungan yang dilaksanakan oleh kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah. | 1. Jumlah K/L/pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan/ program/kegiatan yang responsif gender di bidang SDA dan Lingkungan | 4 K/L 4 Prov |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang memiliki dan mengembangkan kebijakan/ program/kegiatan Bidang SDA dan Lingkungan yang responsif gender | 4 K/L 4 Prov |
| 3. Meningkatnya jumlah K/L dan Pemda yang memiliki dan atau memanfaatkan Kebijakan Sistem Data Gender dibidang SDA dan Lingkungan | 1. Jumlah Kebijakan sistem data gender di bidang SDA dan Lingkungan. | - |
| | 2. Jumlah K/L/pemda yang difasilitasi dalam penyusunan kebijakan data gender di bidang SDA dan Lingkungan | 1 K/L 4 Prov |
| | 3. Jumlah K/L/pemda yang memiliki dan memanfaatkan data gender di bidang SDA dan Lingkungan | 1 K/L 4 Prov |

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Gender Dalam Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Drs. Dermawan, M.Si
NIP. 19630628.198503.1.003

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Perlindungan Perempuan

Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|--------------------------------|
| 1. Meningkatnya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan | 1. Jumlah Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan perlindungan hak perempuan | 8 K/L 11 Prov 6 Kab/Kota |
| | 2. Persentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan | 40 % |
| 2. Meningkatnya penyediaan dan pemanfaatan data perlindungan hak perempuan dan informasi gender | 1. Jumlah Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengembangkan dan memanfaatkan data perlindungan hak perempuan dan informasi gender | 11 K/L 12 Prov |

Jakarta, November 2013

Deputi

Bidang Perlindungan Perempuan

Dra. Luly Altruismaty, M.Sc
NIP. 19570622.198103.2.002

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Informasi Gender
Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|--|---|
| 1. Meningkatnya Jumlah Kebijakan Penerapan Sistem Data Gender | 1. Jumlah kebijakan penyusunan data dan informasi gender | - |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan penyusunan data dan informasi gender | 14 Provinsi 5 K/L |
| | 3. Tersedianya sistem data gender | 1 Sistem |
| 4) Meningkatnya penyediaan dan pemanfaatan data gender | 1. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas pengelola data gender | - |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data dan menerapkan kebijakan data dan informasi gender | 5 provinsi 5 K/L |
| | 3. Data dan Informasi Gender | 2 Publikasi (Pembangunan Manusia Berbasis Gender dan Statistik Gender) |

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Informasi Gender

Ir. Lies Rosdianty, M.Si
NIP. 19631018.198601.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan
Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|--|---------------------|
| 1. Meningkatnya Jumlah Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan | 1. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan | - |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan | 6 K/L 6 Provinsi |
| | 3. Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan | 3 K/L 3 Provinsi |
| | 4. Persentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan | 40 % |
| 2. Meningkatnya penyediaan dan pemanfaatan data perlindungan perempuan dari tindak kekerasan | 5. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam pengembangan data perlindungan perempuan dari tindak kekerasan | 4 Provinsi |
| | 6. Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data perlindungan perempuan dari tindak kekerasan | 2 Provinsi |

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan

Rohika Kurniadi Sari, SH,M,Si
NIP. 19640415.199003.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Penanganan Masalah Sosial Perempuan
Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|-----------------------------------|
| 1. Meningkatnya Jumlah Kebijakan Perlindungan Masalah Sosial Perempuan | 1. Jumlah kebijakan penanganan masalah sosial perempuan | - |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang Difasilitasi Dalam Penerapan Kebijakan Perlindungan Masalah Sosial Perempuan | 1 K/L 4 Provinsi 3 Kab/Kota |
| | 3. Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan penanganan masalah sosial perempuan | 1 K/L 1 Provinsi 1 Kota |
| 2. Meningkatnya penyediaan dan pemanfaatan data terkait dengan masalah sosial perempuan | 1. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data masalah sosial perempuan | 1 K/L 2 Provinsi |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data masalah sosial perempuan | 1 Provinsi |

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Penanganan Masalah Sosial Perempuan

Hasan, SH
NIP. 19600708.198503.1.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Perlindungan Korban Perdagangan Orang
 Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|-----------------------------------|
| 1. Meningkatnya Jumlah Kebijakan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang | 1. Jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang | - |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang | 5 K/L 5 Provinsi 5 Kab/Kota |
| | 3. Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang | 5 K/L 5 Provinsi 5 Kab/Kota |
| 2. Meningkatnya penyediaan dan pemanfaatan data terkait perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang | 1. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang | 5 K/L 3 Provinsi |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang | 5 K/L 3 Provinsi |

Jakarta, November 2013

Plt. Asisten Deputi
Perlindungan Korban Perdagangan Orang

Ir. Lies Rosdianty, M.Si
NIP. 19631018.198601.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan

Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---------------------|
| 1. Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan | 1. Jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan | 1 kebijakan |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan | 1 K/L 2 Provinsi |
| | 3. Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan | 1 K/L 2 Provinsi |
| 2. Meningkatnya penyediaan dan pemanfaatan data perlindungan tenaga kerja perempuan | 1. Jumlah kompilasi data perlindungan tenaga kerja perempuan | 1 K/L 2 Provinsi |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data perlindungan tenaga kerja perempuan | 1 K/L 2 Provinsi |

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan

Dra. Lenny N. Rosalin, M.Sc
NIP. 19640310.198811.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Perlindungan Anak

Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|--|------------------|
| Meningkatkan peran Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. | 1. Jumlah Kementerian/Lembaga, Provinsi/ Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan perlindungan anak. | 9 K/L 20 Prov |
| | 2. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan | 40% |
| Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data perlindungan anak | 1. Jumlah Kementerian/Lembaga , Provinsi/ kab/kota yang memanfaatkan data perlindungan anak. | 6 K/L 17 Prov |

Jakarta, November 2013
Plt. Deputi
Bidang Perlindungan Anak

Dr. Wahyu Hartomo, M. Sc
NIP. 19570302.198303.1.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum
Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|---|-----------------|
| Meningkatnya Jumlah Kebijakan Untuk Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum | 1. Jumlah Pedoman Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum | 2 Kebij |
| | 2. Sistem Peradilan Pidana Anak | 3 K/L |
| | 3. Jumlah K/L dan Pemda yang Difasilitasi Tentang Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum | 2 K/L 5 Prov |
| | 4. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data anak yang berhadapan dengan hukum | 1 K/L 2 Prov |

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum

Ali Khasan, SH. M.Si
NIP. 19630906.199303.1.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus

Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|--|-----------------|
| Meningkatnya Jumlah Kebijakan Perlindungan Bagi Anak yang Berkebutuhan Khusus | 1. Jumlah Pedoman Perlindungan Bagi Anak yang Berkebutuhan Khusus | 1 Kebj |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi tentang PA yang berkebutuhan khusus | 2 K/L 3 Prov |
| | 3. Jumlah Pemda dan K/L yang difasilitasi penyusunan data anak berkebutuhan khusus | 1 K/L 4 Prov |

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus

Dra. Sri Winarsih
NIP. 19560111.198303.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil Anak

Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|--|-----------------|
| Meningkatnya Jumlah Kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak | 1. Jumlah Pedoman Hak Sipil Anak | 1 Kebj |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang Difasilitasi Tentang Hak Sipil Anak | 1 K/L 4 Prov |
| | 3. Jumlah K/L dan Pemda yang Difasilitasi Dalam Penyusunan Data Hak Sipil Anak | 1 K/L 4 Prov |

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Pemenuhan Hak Sipil Anak

Rudy Purboyo, S. H
NIP. 19551111.198402.1.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Penanganan Kekerasan Terhadap Anak
Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|-----------------|
| Meningkatnya Jumlah Kebijakan Penghapusan Kekerasan Pada Anak | 1. Jumlah Pedoman Penghapusan Kekerasan Pada Anak | 1 Kebij |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang Difasilitasi Tentang Penghapusan Kekerasan Pada Anak | 2 K/L 2 Prov |
| | 3. Jumlah K/L dan Pemda yang Difasilitasi Tentang Penyusunan Data Anak Korban kekerasan | 1 K/L 3 Prov |
| | 4. Pelaksanaan survey prevalensi KTA | 1 Dokumen |

Jakarta, November 2013
Asisten Deputi
Penanganan Kekerasan Terhadap Anak

Dr. Ir. Pribudiarta Nur, MM
NIP. 19660324.199103.1.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Penanganan Masalah Sosial Anak

Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|-----------------|
| Meningkatnya Jumlah Kebijakan Perlindungan Anak Dari Masalah Sosial | 1. Jumlah Pedoman Perlindungan Anak Dari Masalah Sosial | 1 Kebij |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang Difasilitasi Tentang Perlindungan Anak Dari Masalah Sosial | 2 K/L 6 Prov |
| | 3. Jumlah K/L dan Pemda yang Difasilitasi Dalam Penyusunan Data Perlindungan Anak Dari Masalah Sosial | 2 K/L 4 Prov |

Jakarta, November 2013

Asisten Deputi
Penanganan Masalah Sosial Anak

Dra. Maydian Werdiastuti, M.Si
NIP. 19630509.198811.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak

Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|--|-----------------------------------|
| 1. Meningkatnya K/L dan Pemda yang melaksanakan pembangunan bidang tumbuh kembang. | 1. Jumlah kebijakan tumbuh kembang anak | - |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemerintah Daerah yang Mengembangkan kebijakan/program/kebijakan tumbuh kembang anak | 12 K/L 27 prov 100 kab/kota |
| | 3. Jumlah K/L dan Pemerintah Daerah yang memanfaatkan data tumbuh kembang anak | 5 K/L 33 prov 100 kab/kota |
| | 4. Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) | 100 kab/kota |

Jakarta, Desember 2013
Deputi
Bidang Tumbuh Kembang Anak

Dr. Wahyu Hartomo, M. Sc
NIP. 19570302.198303.1.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Pemenuhan Hak Kesehatan Anak

Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|--|------------------|
| 1. Meningkatnya K/L dan Pemda yang melaksanakan Kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak | 1. Jumlah kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak | - |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak | 5 K/L 23 Prov |
| | 3. Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan/program/kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak | 1 K/L 2 Prov |
| | 4. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data pemenuhan hak kesehatan anak | 1 K/L 19 Prov |
| | 5. Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data pemenuhan hak kesehatan anak | 1 K/L 2 Prov |

Jakarta, Desember 2013

Asisten Deputi
Pemenuhan Hak Kesehatan Anak

Laksmi Indiarti. S. Sos
NIP. 19531220.197903.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Lingkungan Dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur
Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|--|------------------|
| 1. Meningkatnya K/L dan Pemda yang melaksanakan Kebijakan Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur | 1. Jumlah kebijakan Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur | - |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur | 8 K/L 29 Prov |
| | 3. Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan/program/kebijakan Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur | 1 K/L 1 Prov |
| | 4. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur | 8 K/L 12 Prov |
| | 5. Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur | 1 K/L 1 Prov |

Jakarta, Desember 2013

Asisten Deputi
Lingkungan Dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur

Ir. Nurti Mukti Wibawati
NIP. 19580411.198303.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Pemenuhan Hak Partisipasi Anak

Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|--|------------------|
| 1. Meningkatnya K/L dan Pemda yang melaksanakan Kebijakan Partisipasi Anak | 1. Jumlah kebijakan Partisipasi Anak | - |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan Partisipasi Anak | 1 K/L 25 Prov |
| | 3. Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan/program/kebijakan Partisipasi Anak | 1 K/L 1 Prov |
| | 4. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data Partisipasi Anak | 3 K/L 17 Prov |
| | 5. Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data Partisipasi Anak | - K/L 6 Prov |

Jakarta, Desember 2013

Asisten Deputi
Pemenuhan Hak Partisipasi Anak

Usman Basuni, SE, MA, MPHR
NIP. 19630520.198803.1.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|------------------|
| 1. Meningkatnya K/L dan Pemda yang melaksanakan Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak | 1. Jumlah kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak | - |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak | 6 K/L 24 Prov |
| | 3. Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan/program/kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak | 1 K/L 3 Prov |
| | 4. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data pemenuhan hak pendidikan anak | 3 K/L 31 Prov |
| | 5. Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data pemenuhan hak pendidikan anak | 1 K/L 3 Prov |

Jakarta, Desember 2013

Asisten Deputi
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

Dra. Niken Kiswandari, M.Si
NIP. 671017.198703.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Pengembangan Kota Layak Anak

Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|--|-----------------------------------|
| 1. Meningkatnya K/L dan Pemda yang melaksanakan Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak | 1. Jumlah kebijakan Pengembangan KLA | - |
| | 2. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan Pengembangan KLA | 24 K/L 20 Prov 100 Kab/Kota |
| | 3. Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan/program/kebijakan Pengembangan KLA | 8 K/L 20 Prov 100 Kab/Kota |
| | 4. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data KLA | 2 K/L 20 Prov 100 Kab/Kota |
| | 5. Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data KLA | 2 K/L 20 Prov 100 Kab/Kota |
| | 6. Jumlah Kabupaten/Kota yang mengembangkan model KLA | 100 Kab/Kota |

Jakarta, Desember 2013

Asisten Deputi
Deputi Pengembangan Kota Layak Anak

Drs. M.A. Budhy Prabowo, M Si
NIP. 19620921.198903.1.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon I : Sekretaris Kementerian

Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|--|--------|
| 1. Meningkatnya dukungan administrasi | 1. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu | 100% |
| | 2. Persentase tahapan reformasi birokrasi yang diselesaikan | 80% |
| | 3. Persentase pengembangan SDM yang diselesaikan tepat waktu | 100% |
| | 4. Persentase layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu | 90% |
| | 5. Persentase layanan administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu | 100% |
| | 6. Persentase layanan sarana dan prasarana yang diberikan sesuai standar | 80% |
| | 7. Persentase layanan administrasi penatausahaan yang diselesaikan tepat waktu | 80% |
| | 8. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% |
| | 9. Persentase layanan pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan secara online (e-procurement) | 90% |
| | 10. Persentase layanan bantuan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Kementerian PP dan PA yang diselesaikan tepat waktu | 90% |
| | 11. Persentase layanan liputan dan dokumentasi di lingkungan Kementerian PP dan PA yang dilaksanakan | 100% |
| 2. Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan kinerja | 1. Persentase laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah | 100% |
| | 2. Persentase laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu | 100% |
| | 3. Persentase laporan Barang Milik Negara yang diselesaikan tepat waktu | 100% |
| | 4. Tersedianya sarana dan prasarana gedung | 100% |

Jakarta, November 2013

Sekretaris Kementerian

Dra. Sri Danti, MA
NIP. 19591115.198803.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Biro Hukum dan Humas

Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|--|--------|
| 1. Terbentuknya citra positif KPP dan PA di forum nasional dan internasional | 1. Persentase Penyediaan informasi yang berkualitas, tepat, cepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan manajemen | 100% |
| | 2. Persentase Layanan hubungan masyarakat yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan | 100% |
| | 3. Persentase Bantuan hukum yang tepat waktu, sesuai kebutuhan dan akuntabel | 100% |
| | 4. Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% |

Jakarta, November 2013
Kepala Biro Hukum dan Humas

Ratna Susianawati, SH, MH
NIP. 19720227.199703.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Biro Perencanaan

Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|---|-----------|
| 1. Meningkatnya rencana program dan anggaran serta evaluasi kinerja organisasi yang diselesaikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi tepat waktu , terintegrasi dan harmonis dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJPN, RPJMN, Renstra) | 1. Persentase Rencana program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan data terkini, terintegrasi dan harmonis dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJPN, RPJMN, Renstra) | 100% |
| | 2. Jumlah laporan rencana dan evaluasi kinerja organisasi | 4 Dokumen |
| | 3. Persentase Kegiatan tindak lanjut dari kerjasama Bilateral dan Multilateral | 100% |
| | 4. Laporan bahan pimpinan dan monev pelaksanaan kinerja program di lingkup KPP dan PA | 5 Dokumen |
| | 5. Jumlah laporan evaluasi kinerja pembangunan gender dan Anak | 1 Dokumen |

Jakarta, November 2013

Kepala Biro Perencanaan

Ir. Agustina Erni Susiyanti, M.Sc
NIP. 19620824.198702.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Biro Umum

Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|---|--------|
| 1. Layanan prasarana dan sarana barang dan jasa, administrasi keuangan, penata usahaan pimpinan dan pengembangan SDM sesuai kebutuhan, tepat waktu dan akuntabel | 1. Persentase pengembangan SDM yang diselesaikan tepat waktu | 100% |
| | 2. Persentase layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu | 90% |
| | 3. Persentase layanan administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu | 100% |
| | 4. Persentase layanan sarana dan prasarana yang diberikan sesuaistandar | 80% |
| | 5. Persentase layanan administrasi penatausahaan yang diselesaikan tepat waktu | 80% |
| | 6. Persentase layanan pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan secara online (e-procurement) | 90% |
| | 7. Persentase laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah | 100% |
| | 8. Persentase laporan Barang Milik Negara yang diselesaikan tepat waktu | 100% |
| | 9. Tersedianya sarana dan prasarana gedung | 100% |

Jakarta, November 2013

Kepala Biro Umum

Ir. Siti Khadijah Nasution, MM
NIP. 19570119.198303.2.001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi Eselon II : Sekretariat KPAI

Tahun Anggaran : 2014

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|---|--------|
| Meningkatnya jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak | 1. Jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak di provinsi | 9 Prov |
| | 2. Jumlah DPRD yang menerima sosialisasi tentang hasil telaah perundangan-undangan, kebijakan, dan Implementasi perlindungan anak | 9 Prov |
| | 3. Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan perlindungan anak | 1 Dok |
| | 4. Persentase (%) layanan prasarana keuangan tepat waktu, sesuai kebutuhan, dan akuntabel | 100% |

Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak,

Linda Amalia Sari, S.IP

Kepala Sekretariat KPAI

Retno Adji Prasetyaju, S.H
NIP. 19581002.198703.2.001

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden No 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Adapun fungsi yang diselenggarakan meliputi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemen PPPA; dan
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemen PPPA.

Sebagai realisasi tugas dan fungsi tersebut, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang mampu menterjemahkan tugas dan fungsi dimaksud. RKT Tahun 2014 Kemen PPPA memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan Kemen PPPA Tahun 2014.

Dengan disusunnya RKT RKT Tahun 2014 Kemen PPPA diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Tahun 2014 Kemen PPPA.

Sekretaris Kementerian

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 2 |
| B. Tujuan | 3 |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN | 4 |
| A. Visi | |
| B. Misi | |
| C. Tujuan | |
| D. Sasaran | |
| BAB III KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN | |
| A. Kebijakan | |
| B. Strategi | |
| C. Program dan Kegiatan | |
| LAMPIRAN | |
| 1. Formulir RKT Kementerian PP dan PA | |
| 2. Formulir RKT Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi | |
| 3. Formulir RKT Deputi Bidang PUG Bidang Politik, Sosial dan Hukum | |
| 4. Formulir RKT Deputi Bidang Perlindungan Perempuan | |
| 5. Formulir RKT Deputi Bidang Perlindungan Anak | |
| 6. Formulir RKT Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak | |
| 7. Formulir RKT Sekretariat Kementerian | |
| 8. Formulir RKT Inspektorat | |
| 9. Formulir RKT KPAI | |

